

## RINGKASAN

Wasilatur Rohima, 2023. **Implementasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Terhadap Sengketa Tanah (Studi Mediasi BPN Kota Probolinggo Dalam Sengketa Tanah Pada Objek *Letter C*)**. Imam Sucahyo, S.IP., M.AP, Ach. Noor Busthomi, S.H.I., M.Si.

Tanah merupakan objek yang sangat penting bagi kehidupan manusia sehingga tidak jarang menjadi objek yang disengketakan baik antar individu maupun kelompok. Hal ini kemudian mengakibatkan banyaknya kasus-kasus pertanahan yang muncul. Lahirnya Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 diharapkan menjadi salah satu jawaban dalam penanganan kasus-kasus pertanahan yang ada tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran bagaimana proses implementasi peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 pada Kantor BPN Kota Probolinggo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Edward III dengan empat variable yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi, Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan Jika dilihat dari empat variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi pada Kantor BPN Kota Probolinggo secara umum belum berjalan maksimal sesuai dengan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011. Hal ini disebabkan adanya berbagai hambatan, maupun kekurangan. Kekurangan dalam variabel sumber daya misalnya baik segi kuantitas maupun finansial. Adanya kekurangan pada bagian sumber daya ini kemudian memberikan pengaruh yang cukup besar pada implementasi peraturan ini.

**Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan publik, Penyelesaian Sengketa, BPN, mediasi**

## **SUMMARY**

*Wasilatur Rohima, 2023. Implementation of Regulation of the Head of the National Land Agency Number 3 of 2011 Regarding Land Disputes (BPN Mediation Study of Probolinggo City in Land Disputes on Letter C Objects).*

*Imam Sucahyo, S.IP., M.AP, Ach. Noor Busthomi, S.H.I., M.Sc.*

*Land is an object that is very important for human life so that it is not uncommon to be an object of dispute between individuals and groups. This then resulted in many land cases that emerged. It is hoped that the issuance of Regulation of the Head of BPN RI Number 3 of 2011 will be one of the answers in handling these existing land cases. This study aims to describe how the process of implementing the Regulation of the Head of BPN RI Number 3 of 2011 at the Probolinggo City BPN Office.*

*The method used in this research is descriptive qualitative research. This study uses Edward III's theory with four variables, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. In general, it has not run optimally in accordance with the Regulation of the Head of BPN RI Number 3 of 2011. This is due to various obstacles, as well as deficiencies. Deficiencies in resource variables, for example, both in terms of quantity and finance. The existence of a shortage in this part of the resource then has a considerable influence on the implementation of this regulation.*

**Keywords:** *Implementation, Public Policy, Dispute Resolution, BPN, mediation*